



PERTEMUAN KONSULTASI MASYARAKAT SEBUAH CARA UNTUK MEMBANGUN KEMITRAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Toni Rusmarsidik

Universitas Krisnadwipayana
e-mail: rusmarsidik@yahoo.com

Abstrak

Pada saat ini telah muncul paradigma baru dalam hal proses pelaksanaan pembangunan, dimana peran masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan di Indonesia bahkan di dunia. Perubahan paradigma tersebut lebih mengedepankan partisipasi masyarakat, dimana masyarakat diberikan peluang untuk menyampaikan keinginannya terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun investor swasta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa pertemuan konsultasi masyarakat saat ini adalah sebuah kebutuhan dalam proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia, agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, didalam Rancangan RPJPN 2025 - 2045 menuju Indonesia Emas, bahwa salah satu Agenda Pembangunan didalam RPJPN 2025 - 2045 adalah terwujudnya transformasi tata kelola yaitu tata kelola proses pembangunan yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif.

Kata kunci: pertemuan, masyarakat, pembangunan

Abstract

*Currently, a new paradigm has emerged in terms of development process, where the role of society will greatly influence at the development policies in Indonesia and even in the world. This paradigm shift prioritizes community participation, where the community is given the opportunity to convey their desires regarding the implementation of development carried out by the central, regional government and private investors. This research aims to provide an illustration that **community consultation meetings** are currently a necessity in the development process in Indonesia, so that the development process could running well. Apart from that, in the 2025 - 2045 RPJPN Draft towards a Golden Indonesia Era, one of the Development Agendas in the 2025 - 2045 RPJPN is the realization of governance transformation, namely governance of the development process with integrity, agility and collaboration.*

Key words: meeting, community, development

PENDAHULUAN

Kebijakan Publik VS Keinginan Masyarakat

Pelaksanaan pembahasan suatu produk hukum atau peraturan melalui pertemuan konsultasi masyarakat sekarang menjadi suatu model bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Tujuan dari upaya pertemuan konsultasi masyarakat adalah untuk terbukanya diskusi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai kondisi masa depan, utamanya mengenai kebijakan untuk membentuk kondisi masa depan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Kondisi ini sangat didukung oleh pelaksanaan demokrasi yang saat ini sedang berjalan di Indonesia, dimana dasar dalam pembangunan adalah berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat. Selain itu sangat penting untuk melibatkan masyarakat semenjak dari tahapan persiapan pembangunan untuk kelancaran proses pembangunan.

Pada hakekatnya pemerintah mendapatkan mandat dari masyarakat untuk menyusun suatu kebijakan publik dalam rangka tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah mempunyai fungsi sosial untuk menyediakan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau memberikan semacam insentif untuk terciptanya lapangan kerja untuk masyarakat miskin.

Dalam rangka pengembangan kebijakan publik, pemerintah harus mempunyai kesadaran bahwa kebijakan publik seharusnya direfleksikan sebagai keinginan masyarakat sepanjang masyarakat sendiri mengerti dan sadar akan pentingnya kebijakan publik bagi mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan publik yang sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian dapat kita mengerti bahwa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus pula didukung oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga kebijakan publik tersebut dapat menciptakan perubahan pada masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat mempunyai rasa kepemilikan terhadap kebijakan publik tersebut.

Visi masyarakat dan bangsa kita secara keseluruhan adalah membawa masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama mengelola pembangunan. Berdasarkan visi tersebut, pemerintah sebagai pelaksana dalam pengembangan sektor seharusnya menciptakan banyak agen-agen perubahan untuk memfasilitasi, memotivasi dan memberikan saran dan nasehat untuk mendidik masyarakat dalam pengembangan kemampuan mereka untuk tercapainya pemberdayaan masyarakat yang lebih besar untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional. Salah satu cara untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bidang fisik maupun non fisik adalah melalui upaya yang dibungkus dalam suatu pertemuan konsultasi masyarakat.

Pertemuan konsultasi masyarakat adalah suatu proses pembelajaran masyarakat agar mereka mengetahui hak dan kewajibannya dan untuk terciptanya upaya pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dengan melalui proses pertemuan konsultasi masyarakat sebagai suatu proses pembelajaran akan menciptakan masyarakat yang terdidik yang mengetahui kemampuan sendiri, masalah mereka dan mengerti bagaimana memecahkannya oleh mereka sendiri. Namun demikian, tanpa kesamaan pemahaman akan nilai yang dipegang oleh pemerintah dan masyarakat, akan sangat sulit untuk membentuk pemberdayaan masyarakat. Adalah prasyarat utama bahwa kita saat ini harus mendengarkan keinginan masyarakat yang membutuhkan akses terhadap infrastruktur untuk tercapainya kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, kita perlu membangun komitmen dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan.

Untuk tercapainya kemitraan yang baik, telah dikenal bahwa modal sosial adalah merupakan suatu kekuatan perubahan dalam proses pembangunan dimana melalui modal sosial suatu pembangunan di suatu daerah dapat dibiayai, dilakukan dan dikendalikan oleh masyarakat sendiri. Modal sosial yang didukung dengan pengelolaan dan organisasi yang baik dapat meningkatkan akses kepada sumber daya dan pelayanan publik. Modal sosial yang secara potensial adalah dimiliki masyarakat sendiri dapat menciptakan begitu banyak kesempatan ekonomi dan sosial dalam rangka tercapainya pemberdayaan masyarakat yang lebih besar.

Makalah ini akan memfokuskan pada pentingnya pertemuan konsultasi masyarakat yang digunakan sebagai alat dalam tercapainya partisipasi masyarakat yang lebih baik dalam pembangunan nasional, sehingga setiap kebijakan publik yang disusun oleh pemerintah akan membutuhkan kondisi awal untuk menyesuaikan nilai-nilai dasar yang diyakini masyarakat sebagai kearifan lokal.

DASAR TEORI

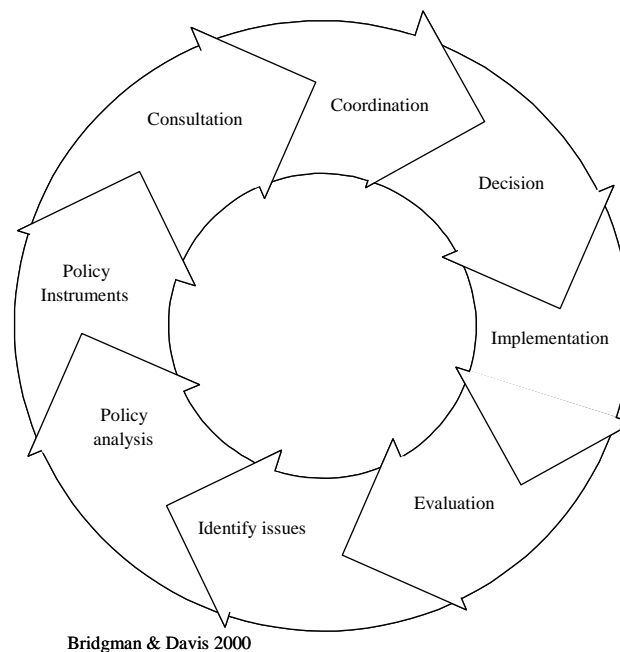
Apakah kebijakan publik?

Adalah sangat sulit untuk menyepakati sebuah definisi kebijakan publik sebagai suatu alat untuk melibatkan banyak hal dan banyak masyarakat. Namun demikian, kita dapat menyepakati bahwa tanpa kebijakan publik hal ini akan sangat sulit untuk suatu masyarakat modern dalam melakukan fungsinya. Davis and Bridgman (2000) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai :

“...the instrument of governance, the discussions that direct public resources in one direction but not another. It is the outcome of the competition between ideas, interests and ideologies that drives our political system”

Kebijakan publik mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam rangka kita membuat suatu rencana dan mengalokasikan sumber daya masyarakat untuk tercapainya sasaran yang diinginkan masyarakat. Pemerintah mengalami tekanan-tekanan untuk membuat kebijakan publik yang lebih demokratis, akuntabel dan setara. Mengerti akan pengembangan kebijakan publik yang baik dalam rangka tercapainya sasaran pembangunan seperti yang diinginkan masyarakat adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama. Kebijakan publik harus dirumuskan secara berhati-hati disesuaikan dengan lingkungan atau situasi yang ada. Adalah penting ketika kebijakan publik disusun, maka harus realistis dan terjangkau.

Model yang dikembangkan oleh Bridgman and Davis dalam rangka menyusun kebijakan publik yang baik harus melalui tahapan sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus Kebijakan

Proses Pertemuan Konsultasi Masyarakat

Sudah menjadi hal umum bahwa pemerintah dalam masyarakat yang demokratis pemerintah melakukan proses pertemuan konsultasi masyarakat secara luas dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional. Proses pertemuan konsultasi masyarakat adalah sangat penting sebagai upaya sharing informasi dari banyak kebijakan publik terkait dengan pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dan



PRINSIP-PRINSIP YANG HARUS DILAKUKAN AGAR TERCAPAINYA PROSES PERTEMUAN KONSULTASI MASYARAKAT YANG BAIK.

Tingginya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah sangat penting untuk tercapainya keberlanjutan pembangunan. Dengan melaksanakan proses konsultasi masyarakat, pemerintah percaya bahwa akan tercapainya kesempatan yang sangat baik untuk membangun kepercayaan dan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana agar proses konsultasi masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien dalam rangka menyusun kebijakan publik yang lebih baik. Pada dasarnya terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka tercapainya proses konsultasi masyarakat yang efisien dan efektif, yaitu :

1. Sebelum memulai konsultasi masyarakat, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu :
 - a) Dijelaskan dengan baik proses, tujuan dan sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan.
 - b) Perlu dipastikan terdapat cukup dana untuk kegiatan konsultasi masyarakat.
 - c) Sangat realistis dalam penyusunan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan
 - d) Perlu dipastikan kesediaan dan dukungan dari pejabat senior dalam kegiatan pertemuan konsultasi masyarakat yang akan dilaksanakan.
 - e) Perlu dipastikan bahwa kegiatan pertemuan konsultasi masyarakat yang akan dilakukan berada dalam suatu proses pengambilan keputusan atau saling terkait dengan kegiatan lainnya
2. Perhatian yang komprehensif pada tahap awal dalam suatu proses kegiatan akan dapat meyakinkan suatu proses yang konsisten dalam pelaksanaannya. Hal ini seharusnya juga memunculkan pemahaman yang lebih baik diantara stakeholders yang terlibat. Sangat penting untuk menjelaskan apa yang akan terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan, kapan hal itu akan muncul, oleh siapa, bagaimana semua hasil yang dicapai dapat didokumentasikan dan dilaporkan. Untuk itu, pada tahap awal pelaksanaan pertemuan konsultasi masyarakat perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Memulai dengan tujuan dan sasaran yang jelas serta pertahankan dalam proses pertemuan konsultasi masyarakat tersebut.
 - b) Pastikan bahwa sasaran dapat dimengerti oleh semua orang.
 - c) Berikan kesempatan untuk melaksanakan revisi dan mengklarifikasi kembali sasaran selama proses berlangsung.
 - d) Berlakukannya proses yang transparan sehingga tidak muncul harapan-harapan yang salah dari masyarakat.
 - e) Konsisten terhadap pendekatan yang digunakan selama proses berlangsung untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dengan cara :
 - Kaji kembali tujuan dan sasaran asli selama proses pertemuan konsultasi masyarakat berlangsung.
 - Evaluasi proses yang sedang berlangsung sebagai masukan pada proses selanjutnya.
 - f) Terbuka dan jujur dalam proses konsultasi masyarakat
 - g) Susun peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh seluruh partisipan dalam rangka pelaksanaan kegiatan konsultasi masyarakat.
3. Sumber daya yang ada harus dialokasikan setara, artinya orang miskin, cacat, dan wanita mempunyai kesempatan yang sama dalam melaksanakan proses konsultasi masyarakat, sehingga suara mereka juga dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan.
4. Menentukan tahapan-tahapan yang realistis dan jelas dalam proses pertemuan konsultasi masyarakat akan sangat menghemat waktu, dengan demikian diperlukan :

- a) Mendorong partisipan untuk dapat menanggapi proses pelaksanaan pertemuan konsultasi masyarakat dan tidak hanya pada isi dari materi yang dipertemuan konsultasi masyarakat.
- b) Kembangkan suatu fleksibilitas yang baik.
- c) Susun target-target yang sangat terjangkau
- d) Evaluasi proses pada setiap pencapaian target.
- e) Upayakan bahwa proses pertemuan konsultasi masyarakat juga memperhatikan partisipan yang sangat lambat dalam menyuarakan keinginannya, sehingga semua keinginan dapat diakomodasikan dengan baik.
- f) Nyatakan proses pertemuan konsultasi masyarakat yang akan dilaksanakan dengan sejelas-jelasnya sehingga semua orang mengerti akan peran dan kontribusinya dalam pelaksanaan kegiatan.
- g) Pastikan bahwa tidak ada halangan bahasa, umur, cacat, latar belakang budaya yang menjadi penghalang semua orang untuk dapat terlibat dalam proses pertemuan konsultasi masyarakat.

Selanjutnya untuk mendapatkan suatu proses pertemuan konsultasi masyarakat yang baik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Identifikasi stakeholders yang akan terlibat dalam proses pertemuan konsultasi masyarakat yang terdiri dari :

(1) Stakeholder yang berwenang mengambil/membuat kebijakan, terdiri dari:

- a. Eksekutif, seperti Bappenas, DepKimpraswil, Depdagri, BPN, Bappeda, Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah serta Instansi sektoral Pusat dan Daerah seperti Dinas/Kantor terkait yang mempunyai fungsi Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan, Pertambangan, Kelautan, Perhubungan, Lingkungan Hidup/Bappedal, Kepariwisata;
- b. Legislatif, seperti DPR dan DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten;
- c. Yudikatif.

Peran yang dilakukan oleh stakeholder yang mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan adalah:

- a. Menyusun produk hukum dan aturan main (seperti norma, standar, pedoman, petunjuk dan kriteria) yang berkaitan dengan peran dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan;
- b. Merevisi kebijakan yang ada baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas;
- c. Memberikan komitmen politik, khususnya bagi legislatif dan eksekutif, dalam membuat kebijakan publik dengan berpihak pada kesejahteraan masyarakat;
- d. Melakukan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang ada, baik profesional, birokrat maupun warga masyarakat agar lebih mampu melaksanakan proses pembangunan dengan baik dan benar;
- e. Mengembangkan komunikasi antar stakeholder melalui berbagai media yang sudah dikuasai maupun yang belum dikuasai oleh warga masyarakat;
- f. Mendorong bantuan ke sasaran yang lebih tepat, yaitu masyarakat setempat seperti misalnya mendorong block grand dari kecamatan ke desa;
- g. Melakukan kajian biaya sosial budaya dan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan untuk diinformasikan kepada stakeholder;

(2) Stakeholder yang terkena dampak dari kebijakan, terdiri dari:

- a. Kelompok Warga Setempat;
- b. Warga sesuai dengan kelompok kegiatannya, seperti kelompok Nelayan, Buruh Tani, Pemakai Air, Forum Agama dan sebagainya.



Peran yang dilakukan oleh stakeholder yang terkena dampak kebijakan dalam pemanfaatan ruang adalah:

- a. Mendorong pengembangan forum warga;
- b. Berupaya mendapatkan manfaat lebih besar dari proses pembangunan yang mencakup wilayahnya;
- c. Berupaya meminimalisasi konflik pemanfaatan ruang dalam pembangunan dengan berorientasi keuntungan dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Stakeholder yang mengawasi kebijakan, terdiri dari:

- a. DPR;
- b. DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota;
- c. LSM;
- d. Pers/Media massa;
- e. Forum Warga;
- f. Partai Politik;
- g. Asosiasi Profesi; dan
- h. Perguruan Tinggi.

Peran yang dilakukan oleh stakeholder yang mengawasi kebijakan publik adalah:

- a. Melakukan pengawasan secara benar atas proses pembangunan yang dilakukan oleh stakeholder;
- b. Menghidupkan fungsi pengawasan dan guardian angel dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. Melembagakan mekanisme pengawasan publik yang transparan dan akuntabel;
- d. Melakukan kajian-kajian untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang bermoral.

(4) Stakeholder kelompok Interest dan Pressure Group yang terkait kebijakan, terdiri dari:

- a. Partai Politik;
- b. LSM;
- c. Pengusaha;
- d. Forum Warga;
- e. Asosiasi Profesi;
- f. Perguruan Tinggi; dan
- g. Kelompok Mediasi.

Peran yang dilakukan oleh stakeholder kelompok interest dan pressure group dalam pemanfaatan ruang adalah:

- a. Melakukan berbagai upaya penyadaran berbagai stakeholder atas hakekat pembangunan yang baik dan benar yaitu lestari dan berkesinambungan;
- b. Melakukan kampanye tentang transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik;
- c. Melakukan mediasi dari proses dan produk pembangunan;
- d. Melakukan upaya-upaya yang menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan, seperti melalui pilot project atau kegiatan sejenis.

(5) Stakeholder yang mempunyai kepentingan agar kegiatan atau kebijakannya berjalan, terdiri dari:

- a. Pressure group, seperti Partai Politik, LSM, dan Forum Warga;
- b. Kelompok Pendukung, seperti Negara Donor, Pengusaha, Perguruan Tinggi, Warga, Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Kelompok Mediasi.

Peran yang dilakukan oleh stakeholder yang mempunyai kepentingan agar kegiatan/ kebijakan berjalan dengan baik dan lancar dalam proses pembangunan adalah:

- a. Melakukan upaya pelembagaan proses partisipasi atau pelibatan masyarakat;
- b. Membangun saluran-saluran dan simpul-simpul partisipasi;
- c. Menggali dan mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal;
- d. Mendesiminasikan best practices;
- e. Menterpadukan kelembagaan dan aparat terkait agar proses pembangunan berjalan baik.

Peran masing-masing stakeholder tersebut berlaku untuk berbagai tingkatan hirarki seperti Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota, akan tetapi bentuk dan tata cara kegiatannya bisa saja berbeda. Peran tersebut dapat dilakukan oleh stakeholder baik secara sendiri maupun berkelompok atau bersinergi sesuai dengan networking yang dimilikinya.

2. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama yang sangat menentukan dalam proses pertemuan konsultasi masyarakat;
3. Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pertemuan konsultasi masyarakat;
4. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya;
5. Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika;
6. Memperhatikan perkembangan teknologi dan profesional

Dengan memperhatikan tahapan-tahapan dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam suatu proses pertemuan konsultasi masyarakat yang efisien dan efektif, selanjutnya proses pertemuan konsultasi masyarakat tersebut antara lain adalah :

1. Merumuskan Isu
2. Mengidentifikasi stakeholder yang akan terlibat
3. Merumuskan tujuan dan sasaran
4. Membangun dukungan
5. Mengembangkan pesan-pesan dalam proses pertemuan konsultasi masyarakat
6. Memilih saluran-saluran komunikasi
7. Menggalang dana
8. Pelaksanaan /implementasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai kesimpulan adalah pertemuan konsultasi masyarakat saat ini dipercaya sebagai salah bagian dari proses pembangunan yang harus dilalui. Era sudah berubah menuju pemerintah yang “good governance”. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam proses pembangunan adalah syarat mutlak yang harus diikuti oleh pelaku pembangunan yang ada di negeri ini.

Sebagai saran dari makalah ini adalah peran serta masyarakat saat ini harus menjadi “panglima” dalam pembangunan agar terwujudnya pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Peran komunitas-komunitas yang ada didalam masyarakat akan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan dunia digital yang semakin maju. Oleh karena itu, kekuatan komunitas masyarakat yang didalam dunia digital dikenal sebagai “netizen” yang dapat mempengaruhi opini publik akan menjadi tantangan tersendiri bagi kesuksesan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

- A Case Study for Ecologically Sustainable Urban Development : A Report to the OECD and Australian Governments, Foulsham & Munday Pty Ltd, ACT
- Achwan, Rochman (2002). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kimpraswil : Perspektif Social Capital
- Chapter 3. The Policy Cycle**, The Australian Policy Handbook (2nd edition), Brigman P & Davis, G, 2000, Allen& Unwin, Sydney
- Chapter 4. A Checklist of Participatory Planning Approaches** Community Participation : A Practical Guide
- Soetojo, Hana (2002). Perlunya Berbagi Informasi Dengan Masyarakat. Air Magazine. Jakarta.